

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerajaan Bhutan (*Kingdom of Bhutan*) atau lebih sering disebut dengan Bhutan, merupakan negara berukuran kecil yang secara geografis berada di antara China dan India. Luas dari Bhutan sendiri tidak lebih besar dari Swiss atau setengah dari luas negara bagian Indiana di Amerika Serikat (Nations Online, 2018). Berlokasi di timur pegunungan Himalaya, dengan kondisi geografis yang terdapat banyak jurang dan dikelilingi oleh hutan, membuat keberadaan Bhutan terkesan cukup terasingkan dan terisolasi dari negara-negara yang berada di sekitarnya (Mullen, 2018). Sehingga, karena letaknya yang cukup terpencil, negara ini sering disebut dengan *landlock country in Southeast Asia*. Berbanding lurus dengan luas wilayah yang sempit, jumlah penduduk Bhutan juga tergolong sangat sedikit, yaitu kurang lebih 750.000 jiwa (BBC, 2018). Dengan kondisi penduduk yang sangat sedikit Bhutan menjadi negara dengan kepadatan penduduk paling rendah dari seluruh negara di Asia Selatan (Choden & Wangchuck, 2018).

Dari seluruh penduduk Bhutan tersebut hanya sekitar 1% hingga 2% yang bekerja pada sektor industri dan konstruksi. Sedangkan sebagian besar sisanya, penduduk Bhutan berprofesi sebagai petani (Barclay, 2012). Sedikitnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri membuat 79% penduduk Bhutan sangat bergantung pada sektor pertanian dan peternakan sebagai sumber utama ekonomi mereka (Dorji, Olesen, Bocher, & Seidenkrantz, 2016). Secara tidak langsung kondisi ini dapat digambarkan dari minimnya pusat industri yang dimiliki oleh Bhutan. Keberadaan industri di Bhutan pun hanya terpusat pada kota-kota tertentu saja,

seperti Kota Timphu dan Kota Phuntsholing yang berada di Distrik Chhukha (Ministry of Works and Human Settlement Royal Government of Bhutan, 2016). Meskipun berada di pusat industri, hanya terdapat beberapa industri besar yang beroperasi di wilayah tersebut, seperti: *Penden Cement Authority*, *Bhutan Carbide and Chemicals*, dan *Gedu Wood Manufacturing Corporation*. Bahkan karena sangat bergantungnya dan pentingnya sektor pertanian bagi masyarakat Bhutan, mereka sering menyebut sektor pertanian sebagai “*mother of all cultures*” (Sangay & Bernstrorff, 2017).

Gambar 1.1 Peta lokasi negara Bhutan



Sumber: <https://nepalandbhutanblog.wordpress.com/>

Dari sisi komposisi pemeluk agama, mayoritas penduduk Bhutan menganut agama Buddha. Dengan populasi

pemeluk agama Buddha yang mencapai lebih dari 80%, pengaruh ajaran Buddha Mahayana di negara tersebut banyak ditemukan dalam berbagai aspek, baik fisik maupun non-fisik. Dari segi fisik, bentuk dari pengaruh agama Buddha dapat dilihat dari desain beberapa bangunan tempat ibadah dan bangunan kuno. Tidak hanya bangunan yang bersifat milik umum, desain bangunan yang bersifat milik pribadi, seperti rumah-rumah warga Bhutan, juga merepresentasikan pengaruh dari agama Buddha. Hampir seluruh interior rumah warga di Bhutan memiliki corak warna cat sama, yang disebut dengan *thang kha*, serta memiliki altar sebagai tempat ibadah (Rigyal & Prude, 2017). Tidak hanya dari arsitektur bangunan, pengaruh tersebut dapat dilihat pula melalui cara berpakaian masyarakat Bhutan sehari-hari yang menggunakan pakaian nasional (Collins, 2012). Warga Bhutan wajib memakai pakaian tersebut ketika berada dalam acara resmi atau formal tertentu dan ketika berada di kantor pemerintahan (Rigyal & Prude, 2017). Pakaian nasional Bhutan tersebut juga hampir selalu mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu *Gho* untuk pakaian pria dan *Kira* untuk pakaian wanita (Newbold, 2016). Apabila dilihat dari aspek non-fisik, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Buddha Mahayana tercermin dan terimplementasikan oleh pemerintah dan masyarakat Bhutan sendiri dan menjadi identitas Bhutan. Salah satu bentuk implementasi yang terus berkembang dan masih dipertahankan yaitu *Gross National Happiness (GNH)*.

Kemunculan GNH bermula pada sekitar abad 16. Merupakan abad dimana Bhutan masih berbentuk negara dengan sistem pemerintahan teokrasi yang dipimpin oleh *Shabdrung* Ngawang Namgyal (Macrae, 2016). Namun setelah Raja Ngawang Namgyal wafat pada tahun 1651, Bhutan mengalami konflik yang berkepanjangan. Selama kurang lebih 300 tahun pasca wafatnya Raja Ngawang

Namgyal, terjadi perebutan kekuasaan antar-elit. Akibatnya roda pemerintahan Bhutan tidak mampu berjalan dengan baik, yang pada akhirnya membawa penderitaan bagi seluruh masyarakat Bhutan.

Kondisi berubah ketika Raja Ugyen Wangchuck terpilih secara konsensus untuk memimpin Bhutan pada tahun 1907 (Macrae, 2016). Raja Ugyen Wangchuck berusaha menginisiasi kebijakan modernisasi Bhutan, sekaligus melakukan normalisasi kondisi negara pasca konflik berkepanjangan. Secara berkelanjutan, kebijakan tersebut terus diimplementasikan oleh raja-raja berikutnya. Hingga pada akhirnya saat masa kepemimpinan Raja Jigme Dorji Wangchuck, kebijakan modernisasi mengerucut menjadi bagian dari kebijakan pembangunan Bhutan (Macrae, 2016). Hal ini ditegaskan dengan filosofi yang dipegang raja Bhutan yang naik tahta pada tahun 1952 tersebut, bahwa tujuan dari sebuah pembangunan adalah “menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bahagia” (Priesner, 2004). Filosofi pembangunan tersebut kemudian mulai diperkenalkan ke dunia internasional saat Bhutan diakui sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1971 (Priesner, 2004).

Meskipun telah wafat, filosofi pembangunan yang dibawa Raja Jigme Dorji masih dipertahankan dan diwarisi oleh anaknya, yaitu Raja Jigme Singye. Perbedaannya, di bawah pemerintahan Raja Jigme Singye, filosofi tersebut telah diadaptasi menjadi *Gross National Happiness (GNH)*, yang untuk pertama kalinya diperkenalkan pada sekitar awal tahun 1970-an (GNH Centre Bhutan, 2018). GNH itu sendiri lahir sebagai respon atas kekhawatiran akan ketidakmampuan pemerintah serta masyarakat untuk mengontrol emosi dan perasaan. Buddha Mahayana mengajarkan bahwa untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan, perlu adanya kontrol atas diri sendiri dan juga lingkungan sekitar (Thinley,

2007). Keberadaan 1729 *legal code* yang menyatakan bahwa “apabila pemerintah tidak mampu menciptakan kebahagiaan bagi masyarakatnya, maka keberadaan sebuah pemerintahan menjadi tidak ada gunanya”, juga menjadi pendorong kemunculan GNH dan untuk secara berkelanjutan diimplementasikan (Ura, Alkire, Zangmo, & Wangdi, 2012).

Dengan tetap mendasarkan pada filosofi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, konsep GNH memiliki makna bahwa pembangunan berkelanjutan hanya akan tercapai jika mampu menggunakan pendekatan secara menyeluruh dalam hal proses pengembangannya dan memberikan perhatian yang sama terhadap aspek-aspek non-ekonomi (Oxford Poverty & Human Development Initiative). Konsep GNH ini juga dapat dimaknai bahwa pembangunan itu lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga adanya keseimbangan antara hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan (Schroeder, *Politics of Gross National Happiness: Governance and Development in Bhutan*, 2017).

Pengenalan GNH oleh Raja Jigme Singye tersebut diikuti dengan dibuatnya berbagai kebijakan dalam rangka untuk mengaktualisasikan konsep yang sudah ditawarkan. Salah satu contohnya yaitu kebijakan modernisasi melalui pembangunan yang selaras dengan pelestarian tradisi Bhutan melalui kampanye “*one nation, one people*” (Institute on Religion and Public Policy, 2015). Hasilnya, di bawah pemerintahan Raja Jigme Singye jaringan komunikasi Bhutan terbangun dengan baik. Munculnya *Bhutan Broadcasting Service (BBS)* serta mulai masuknya televisi dan internet di sekitar tahun 90-an juga menjadi penanda berjalannya proses modernisasi di Bhutan pada masa kepemimpinan Raja Jigme Singye tersebut (Kumar, 2015).

Di bawah kepemimpinan Raja Jigme Singye, secara keseluruhan konsep GNH lebih banyak diimplementasikan

dalam lingkup domestik Bhutan. Tidak hanya dalam hal pembangunan secara fisik saja, GNH juga diimplementasikan dalam bentuk perlawanan terhadap para pemberontak, membangun iklim industri pariwisata yang baik, hingga memprakarsai pelestarian budaya dan lingkungan alam Bhutan (Ukai, 2016). Dalam perkembangannya Raja Jigme Singye juga mengimplementasikan konsep GNH tersebut dalam lingkup internasional. Di antara bentuk implementasinya adalah penandatanganan kerjasama pembangunan *hydropower* dengan India serta normalisasi hubungan diplomatik dengan India dan China (Ukai, 2016).

Setelah berhasil diimplementasikan dengan baik secara domestik maupun internasional, Bhutan mulai terbuka untuk menawarkan GNH sebagai sebuah alternatif indeks pembangunan global. Indikasi terbukanya Bhutan untuk membagi dan memperkenalkan konsep GNH ke dunia internasional diawali dari pernyataan Raja Jigme Singye dalam sebuah wawancara oleh wartawan India di Bandara Bombay pada tahun 1979. Pasca menghadiri *6th Non-Aligned Movement Summit*, Raja Jigme Singye mengatakan bahwa baginya GNH merupakan hal sangat penting bagi pembangunan (Dorji, 2012). Raja Jigme Singye juga berharap GNH dapat merepresentasikan nilai-nilai yang ada pada ajaran Buddha Mahayana, seperti keseimbangan, harmoni, keberlanjutan, dan kesucian kehidupan (Schroeder, 2015). Internasionalisasi GNH diperkuat dengan pidato dari Perdana Menteri Bhutan dalam *Millennium Meeting for Asia and the Pacific* tahun 1998 di Korea Selatan:

“Bhutan has followed a multi-dimensional approach to development: aimed at spiritual and material balance and harmony. . . . But, every alternative development approach is also a challenge. While we

accept the reality of globalisation and cultural change, we can always endeavour to select the most beneficial aspects of it. To make the correct choice is our greatest present and future tasks; and we believe, very profoundly, that it is a challenge that every country must take up and confront the challenge of increasing human happiness boldly and creatively”(Royal Government of Bhutan, 1998).

Filosofi GNH secara turun temurun diwariskan dari Raja Jigme Singye kepada anaknya, yaitu Raja Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, yang naik tahta pada bulan Desember 2006 dan dinobatkan di bulan November 2008 (Lawson, 2011). Sebagai raja ke-5 Bhutan, Raja Jigme Khesar menyatakan bahwa GNH menjadi salah satu dari empat tanggung jawabnya sebagai raja yang harus ia penuhi. Ia menginginkan untuk dapat menciptakan “masyarakat GNH” melalui peran pemerintah dengan memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua orang dan seluruh makhluk hidup (Bhutan Travel Agency, 2016). Komitmen Raja Jigme Khesar tersebut memiliki *supporting system* berupa konstitusi Bhutan pasal 9.2 yang menyatakan pentingnya peran negara dalam mengimplementasikan GNH (Schroeder, Politics of Gross National Happiness: Governance and Development in Bhutan, 2017). Salah satu bentuk rasa tanggung jawab Raja Jigme Khesar ini juga dapat dibuktikan dengan terbentuknya *Gross National Happiness Commission* pada tanggal 24 Januari 2008. Dimana tugas utama lembaga ini adalah memastikan GNH dapat terimplementasi dengan baik melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat (Centre for Public Impact, 2016).

Tidak seperti Bhutan yang menggunakan GNH, mayoritas negara di dunia justru menggunakan GDP sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Salah satu negara yang

menggunakan indeks tersebut yaitu Amerika Serikat. Bahkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sangat membanggakan pencapaian pemerintahannya dalam pertumbuhan sektor ekonomi dan pembangunan. Hal ini tidak lepas dari klaimnya, bahwa di bawah pemerintahannya GDP Amerika Serikat mencapai 4.1%, tertinggi sejak tahun 2014 (Domm, 2018). Tidak hanya negara, institusi keuangan, seperti IMF dan *World Bank*, juga menggunakan GDP sebagai rujukan utama mereka. Pentingnya GDP dan pertumbuhan ekonomi pun diutarakan oleh seorang ahli pendidikan ekonomi senior, Scott A. Wolla. Dalam tulisannya yang berjudul “*What Are the “Ingredients” for Economic Growth?*”, Scott A. Wolla menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada peningkatan produksi barang dan jasa serta peningkatan terhadap kualitas hidup masyarakat suatu negara (Wolla, 2013).

Penggunaan GDP sebagai indikator keberhasilan pembangunan oleh berbagai pihak tersebut tidak lepas dari stigma bahwa apabila aktivitas produksi dan perekonomian meningkat, maka seluruh rakyat akan menjadi sejahtera (Wartenberg, 2010). Di sisi lain, dipublikasikannya *System of National Account 2008 (2008 SNA)* juga justru menjadi penguat pemahaman bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi indikator paling sesuai untuk menentukan keberhasilan pembangunan. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa GDP merupakan satu dari tiga indikator yang ditawarkan dalam 2008 SNA untuk mengukur pertumbuhan ekonomi (Bank, 2017). Keberadaan 2008 SNA yang berperan sebagai standar statistik ekonomi internasional hasil kerjasama antara PBB, *The European Commission*, *the International Monetary Fund (IMF)*, *the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, dan *World Bank*, juga menjadi bukti bahwa GDP menjadi salah satu indikator yang paling sering

menjadi rujukan bagi negara-negara, organisasi internasional, hingga institusi keuangan dunia (International Monetary Fund, 2009).

Permasalahannya, secara tidak langsung penggunaan GDP sebagai indikator keberhasilan pembangunan mengandung unsur keberpihakan terhadap standar negara-negara Barat. Hal ini dapat ditelaah melalui sudut pandang sejarah, bahwa beberapa institusi keuangan dunia yang ikut memprakarsai 2008 SNA, seperti IMF dan *World Bank*, mengadopsi sistem indikator GDP dari Amerika Serikat dan Inggris, yang pada awal pembentukannya ditujukan untuk mengatur arah pembangunan global (Wolverson, 2013). Di sisi lain kedua institusi tersebut merupakan bagian dari *Bretton Woods System*, yang pembentukannya telah disetujui dalam *Bretton Woods Conference* oleh 44 negara aliansi Amerika Serikat (US Department of State, 2009).

Selain itu, salah satu bentuk adanya bias terhadap negara-negara Barat yaitu adanya *labelling* terhadap status sebuah negara dalam pembangunan oleh *World Bank* (Dang & Pheng, 2015). *World Bank* menerapkan klasifikasi negara yang memiliki GDP di bawah 0.0 hingga di atas 6.0, dengan memberlakukan target dan kebijakan khusus bagi kelompok negara tertentu untuk meningkatkan pembangunannya (Bank, 2017). Selain *World Bank*, *Departement of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat (UN/DESA)* juga memberikan klasifikasi status negara. Dalam data yang mereka publikasikan dalam *World Economic Situation and Prospects 2014*, terdapat empat level keberhasilan pembangunan dari segi pendapatan negara, yaitu: *low income* (<\$1,035 GNI per kapita), *lower middle income* (\$1,036 - \$4,085 GNI per kapita), *upper middle income* (\$4,086 - \$12,615 GNI per kapita), dan *high income* (>\$12,615 GNI per kapita) (United Nations, 2013).

Menurut Hillary Collins dalam tulisannya yang berjudul “*The Danger of Development Labels*”, segala bentuk *labelling* tersebut dapat menciptakan hirarki sosial antar-negara, menguatkan idealisme negara maju untuk selalu intervensi negara berkembang, dan menciptakan diskursus tunggal pembangunan (Collins H. , 2016). Kekhawatiran Hillary Collins ini terjadi pada tahun 1980-an, yang sering disebut dengan masa “*Africa lost decade*”. Intervensi negara-negara Barat secara tidak langsung terlihat ketika kebijakan *structural adjustment* yang dicanangkan oleh *World Bank* justru membuat negara berkembang di dunia, termasuk negara di kawasan Afrika, mentransfer uang sebanyak 178 juta dolar Amerika kepada bank-bank komersil milik negara-negara Barat (Kingston, Irikana, Dienne, & Kingston, 2011). Beberapa bentuk *structural adjustment* tersebut adalah perdagangan bebas, memotong segala bentuk subsidi, dan lain sebagainya, yang justru memiliki pengaruh sangat minim terhadap pembangunan negara-negara di kawasan Afrika (Kingston, Irikana, Dienne, & Kingston, 2011).

Sedangkan pada periode tahun 2011-2012, kekhawatiran Hillary Collins kembali terbukti saat banyak ahli ekonomi dunia yang memuji pertumbuhan ekonomi Afrika yang pesat. Bahkan Charles Robertson, direktur *Renaissance Capital*, mendukung pandangan tersebut dan optimis akan pertumbuhan perekonomian Afrika dengan menerbitkan buku berjudul “*The Fastest Billion: The Story Behind Africa’s Economic Revolution*” (Hauge, 2014). Menjadi sebuah ironi ketika memiliki tingkat GDP yang tinggi, kenyataannya justru masih banyak masyarakat di negara-negara Afrika yang hidup dalam kondisi miskin dan tidak sejahtera. Sesuai saran dari IMF dan *World Bank*, negara-negara Afrika tersebut harus mengalihkan fokus sektor ekonominya, dari pertanian ke industri. Karena tidak siap dan adanya intervensi secara paksa

dari kedua institusi keuangan tersebut, yang terjadi justru timbulnya krisis berkepanjangan dan korupsi yang terus terjadi (Hauge, 2014). Ternyata tidak hanya terjadi di Afrika, kegagalan GDP sebagai indikator keberhasilan pembangunan juga terjadi di negara-negara Barat. Bahkan Amerika Serikat sekalipun sebagai negara adidaya dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil selama kurang lebih 60 tahun, sebanyak 43 juta warganya masih hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak sejahtera (Semuels, 2016).

Kurang idealnya GDP sebagai indikator keberhasilan pembangunan juga diperkuat dengan pendapat dari berbagai pihak. Menurut beberapa ahli ekonomi dari Italia, Perancis, dan Kanada, GDP tidak hanya gagal sebagai sebuah indikator, tetapi juga secara tidak langsung menciptakan pola pikir tunggal bahwa pembangunan hanya tentang pertumbuhan ekonomi (Gertner, 2010). Pendapat ini kembali dikuatkan dengan pandangan seorang politisi dan mantan jaksa agung Amerika Serikat, Robert F. Kennedy, dalam pidatonya di *University of Kansas* pada tahun 1968. Kennedy mengatakan bahwa GDP mungkin bisa mengukur segala hal, namun tidak untuk kualitas nilai-nilai kehidupan (Costanza, Hart, Posner, & Talberth, 2009). Bahkan pencetus pertama GDP, yang merupakan seorang ahli ekonomi Amerika Serikat dan penerima nobel, Simon Kuznet, juga meragukan apabila GDP secara tepat bisa menjadi tolok ukur kesejahteraan (Wolverson, 2013). Sehingga GDP tidak bisa menjadi rujukan sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang universal, khususnya bagi negara-negara berkembang yang ada di kawasan Asia dan Afrika.

Di sisi lain, GNH telah menjadi sebuah alternatif indikator keberhasilan pembangunan oleh beberapa negara dan menjadi rujukan dari beberapa ahli ekonomi dan akademisi. GNH yang dicetuskan Raja Jigme Singye tersebut memiliki

filosofi pembangunan yang tidak hanya fokus dalam aspek materi dan ekonomi, namun juga fokus di sisi non-materi. Dengan karakteristik tersebut, Bhutan selalu menggunakan GNH sebagai indikator keberhasilan pembangunan mereka. Dibawah kepemimpinan Raja Jigme Khesar, salah satu implementasi GNH yang dilakukan adalah pelestarian tradisi *Kidu* yang telah diatur dalam konstitusi Bhutan. *Kidu* itu sendiri merupakan sebutan sebuah tradisi di Bhutan, dimana raja memiliki tanggungjawab besar untuk memberikan jaminan pada seluruh rakyatnya. (Bhutan's New Development Paradigm, 2013). Biasanya raja akan menyediakan bantuan berupa tanah atau berbagai bentuk bantuan lainnya bagi anak-anak, orang tua, disabilitas, dan orang-orang yang sakit.

Jika dilihat dari apa yang sudah Bhutan implementasikan, GNH merupakan indikator keberhasilan pembangunan yang lebih ideal daripada GDP. Salah satu faktornya dapat dilihat melalui berbagai manfaat atau kelebihan yang tidak akan pernah dimiliki GDP. Menurut Gaurav Daga, dalam tulisannya yang berjudul "*Towards A New Development Paradigm: Critical Analysis of Gross National Happiness*", terdapat delapan manfaat apabila GNH menjadi indikator keberhasilan pembangunan global. Manfaat tersebut yaitu dapat menjadi alternatif kebijakan pembangunan yang *people-oriented*, pengelolaan sumber daya alam sesuai kebutuhan masyarakat, memiliki sub-indikator pembangunan, memiliki *screening tools mechanism*, dapat mengukur kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, mudah dalam mengukur *progress* pembangunan, pembangunan yang berkelanjutan, dan adanya orientasi pada proses dalam pembangunan (Daga, 2014).

GNH pun telah mulai menjadi rujukan bagi beberapa aktor di dunia internasional. Di level negara, terdapat Thailand yang telah mendirikan *GNH Centre* pada tahun 2016 di

Bangkok (GNH Centre Thailand, 2017). Pendirian *GNH Centre* ini merupakan hasil dari kerjasama dengan B.Grimm Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang energi, sistem industri, layanan kesehatan, hingga gaya hidup, yang memegang filosofi dari Dalai Lama, yaitu “*Doing Business with Compassion*” (GNH Centre Thailand, 2017). Terbentuknya *GNH Centre* ini juga tidak lepas dari *sufficiency economy philosophy* yang dicetuskan oleh mendiang raja Thailand, Raja Bhumibol Adulyadej, yang memiliki kemiripan dengan filosofi GNH (The Government Public Relations Departement, 2017). Tidak hanya di negara-negara Asia saja, GNH juga diadopsi oleh beberapa negara Eropa Barat. Salah satunya adalah Perancis, yang saat itu masih dipimpin oleh Presiden Nicolas Sarkozy. Tepatnya pada tahun 2009, Presiden Nicolas Sarkozy membuat rencana untuk memasukkan kebahagiaan sebagai salah satu indikator pertumbuhan negaranya (Allison, 2012).

Tidak hanya di level negara, GNH juga telah diadopsi menjadi prinsip dari sebuah organisasi non-profit di Amerika Serikat. Beberapa warga Amerika Serikat yang setuju akan konsep dan nilai-nilai kebahagiaan GNH membentuk *Gross National Happiness USA (GNHUSA)*. Organisasi non-profit yang didirikan pada tahun 2009 ini memang ditujukan untuk membawa misi kebahagiaan bagi setiap individu dengan mengubah cara pandang berproses dan arti dari sukses (GNHUSA, 2018). Bahkan mereka telah memiliki *Charter of Happiness* yang telah ditandatangani oleh lebih dari 400 orang.

Sosialisasi mengenai GNH pun sudah cukup luas dilakukan, salah satunya melalui institusi pendidikan. Seperti yang dilakukan oleh Dr. Saamdu Chetri, Direktur Eksekutif GNH Centre Bhutan, yang diundang untuk mengisi seminar yang terselenggara atas kerjasama *Ateneo de Manila*

University dan Departement of Environment and Natural Resources (DENR) di Henry Lee Irwin Theatre pada bulan Oktober 2016 (Munar & Lorena, 2016). Dalam kesempatan tersebut, Dr. Saamdu Chetri menyampaikan berbagai hal mengenai GNH, seperti sejarah hingga nilai yang terkandung, dengan tujuan untuk memperkenalkan sekaligus memberikan pemahaman lebih pada peserta yang hadir. Centre for Bhutan Studies pun pernah menyelenggarakan seminar di Belanda dengan topik “GNH–As Challenged by the Concept of Decent Society” pada tahun 2001 (Allison, 2012). Bahkan pada tahun 2002, GNH pernah dijadikan sebagai salah satu strategi untuk mengurangi kemiskinan di kawasan Asia Tenggara oleh South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) (Allison, 2012).

GNH yang masih dipertahankan hingga kepemimpinan Raja Jigme Khesar sekaligus adopsi, implementasi, dan dukungan oleh berbagai aktor tersebut merupakan bagian dari *counter-discourse* terhadap paradigma pembangunan ekonomi, khususnya GDP sebagai indikator utama keberhasilan pembangunannya. Perlunya *counter-discourse* juga secara tersirat tersampaikan melalui pendapat dari Perdana Menteri Bhutan periode 2004-2005, Lyonpo Yeshey Zimba. Ia mengatakan bahwa sudah saatnya untuk mengarahkan kembali arah pembangunan dan mempertanyakan tujuan pembangunan. Apakah hanya sekedar untuk mengejar kekayaan atau sesuatu yang lebih besar dengan tujuan yang lebih mulia: yaitu kesejahteraan yang berakhir pada kebahagiaan (Zimba, 2012). Pendapat Lyonpo Yeshey Zimba ini pun juga sejalan dengan tulisan berjudul “*GDP as a Measure of Economic Well-Being*”, yang ditulis oleh seorang profesor bidang Ekonomi di *Harvard University*, Karen Dynan, dan seorang direktur kebijakan di *the Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy*, Louise Sheiner (Dynan

& Sheiner, 2018). Dalam tulisan tersebut dinyatakan bahwa GDP merupakan indikator yang kurang tepat untuk mengukur kesejahteraan, sehingga perlu adanya indikator lain yang lebih komprehensif (Dyan & Sheiner, 2018).

Counter-discourse tersebut juga diperkuat oleh pemerintah Bhutan dengan menawarkan GNH ke dunia internasional. Keberhasilan penawaran tersebut ditandai dengan diadopsinya *non-binding resolution* pada tahun 2011 oleh *United Nations General Assembly* (UNGA). Adopsi ini menandai masuknya indeks kebahagiaan sebagai bagian dari indikator pembangunan global dengan judul *Happiness: Towards a Holistic Approach to Development* (Plett, 2011). Pada kesempatan itu pula, Duta Besar Bhutan untuk PBB, Lhatu Wangchuck, menyampaikan urgensi GNH sebagai standar pembangunan:

“It’s basically an approach. Our initial ideas was to bring the concept of happiness to the consciousness of the UN membership. . . because we know that GDP indicators are inadequate to address human needs.”
(www.bbc.com, “*Bhutan Spreads Happiness to UN*”, 21 Juli 2011)

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Bhutan berupaya menawarkan *Gross National Happiness (GNH)* sebagai alternatif paradigma pembangunan global?

1.3 Landasan Teori

Counter-Discourse

Diskursus (*discourse*) merupakan sebuah pola bahasa yang digunakan oleh seseorang atau pihak tertentu untuk kemudian diketahui bahasa yang digunakan, kebudayaan yang

dianut, hubungan antar-institusi sosial, dan asumsi-asumsi dasar yang dipegang oleh seseorang atau suatu pihak (Whisnant, 2012). Menurut Michael Foucault, seorang ahli filsafat dari Perancis, diskursus dapat dipahami dalam berbagai bentuk. Pertama yaitu ide dan konsep, dimana diskursus dapat dipahami dalam bentuk gagasan sebagai bentuk dari implementasi budaya yang selalu bertransformasi dari waktu ke waktu, dari tempat satu ke tempat yang lain, dan dari orang satu ke orang yang lain. Kedua yaitu mitos, dimana diskursus dapat dipahami sebagai konsepsi maupun miskonsepsi dari sebuah kebudayaan untuk membentuk perilaku dan nilai-nilai baik pada masyarakat. Ketiga yaitu mentalitas, dimana diskursus dapat dipahami sebagai perilaku kolektif suatu kelompok masyarakat sebagai bagian dari tradisi yang ada. Keempat, yaitu pola budaya dan sistem, dimana diskursus dapat dipahami sebagai kebudayaan yang lahir dari interaksi sosial masyarakat. Kelima, yaitu ideologi, dimana diskursus dapat dipahami sebagai kumpulan asumsi ide untuk merefleksikan realitas yang ada dalam masyarakat, terutama kelas masyarakat tertentu, sebagai produk transformasi sosial.

Diskursus dapat menjadi dominan ketika menjadi suatu hal yang bersifat normatif dan berperan sebagai indikator dari pihak yang memegang kekuasaan atau pihak yang mendapat keuntungan di tengah-tengah suatu komunitas. Menurut Foucault, dalam konteks ini diskursus dapat menunjukkan “kekuasaan” suatu pihak atau individu dalam hal sosial, politik dan budaya (Whisnant, 2012). Pemahaman ini sesuai dengan istilah yang diajukan oleh Michael Foucault, yaitu *regime of truth*. Menurut pemahaman Foucault sebelum tahun 1980, *regime of truth* terjadi karena adanya kebenaran yang diproduksi, dipertahankan, dan diatur oleh sebuah sistem atau mekanisme, dengan kebenaran yang dibentuk hanya bersifat politik saja (Lorenzini, 2015). Sehingga dapat

dikatakan bahwa kebenaran tersebut sebenarnya hanya sebuah mitos belaka yang diciptakan atau dibentuk oleh pihak-pihak tertentu. Bagi Foucault, setiap kelompok masyarakat memiliki masing-masing *regime of truth*, dimana sebuah diskursus diterima dan berfungsi membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi (Richardson, 2007). Teknik dan prosedur yang digunakan pun berdasarkan nilai yang dianut diskursus tersebut, dan berdasarkan status pihak yang mengatakan bahwa sesuatu itu benar (Richardson, 2007).

Regime of truth ini menciptakan sebuah sistem, dimana aktor yang terlibat harus dapat memenuhi ekspektasi dari kebenaran tersebut melalui sebuah *game of truth*. Dengan kata lain, *game of truth* merupakan seperangkat aturan mengenai “apa yang harus dilakukan” untuk memperoleh kebenaran tersebut. Padahal menurut Foucault, aturan-aturan untuk mencapai kebenaran tersebut hanya akan menimbulkan permasalahan atau yang ia sebut dengan “*historical-cultural problem*” (Lorenzini, 2015). Sehingga bagi Foucault perlu adanya sebuah *counter-discourse*. Yaitu merupakan suatu kondisi dimana diskursus yang dominan tersebut akan mendapat *challenge* sebagai bentuk perlawanan terhadap diskursus yang ada. Atau dalam kata lain, *counter-discourse* dapat dipahami juga sebagai upaya membentuk sebuah kebenaran baru dari *regime of truth* yang ada.

Teori ini dapat secara jelas menjelaskan mengenai alasan Bhutan untuk menawarkan konsep GNH sebagai alternatif paradigma pembangunan global. Dalam konteks ini, diskursus yang dimaksud adalah pembangunan ekonomi dengan GDP sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang berasal dari negara-negara Barat serta *happiness based-development* dengan GNH yang berasal dari Bhutan.

Gagasan pembangunan ekonomi, dimana merupakan model pembangunan yang menggunakan GDP sebagai indikator keberhasilannya, diposisikan sebagai sebuah *regime of truth* dari komunitas global. Apabila kita merujuk pada penjelasan dari Foucault, posisi ini tidak lepas dari peran dari aktor di belakang diskursus ini yang memiliki agenda tertentu. GDP ini dibentuk dan dipertahankan oleh negara-negara Barat melalui sistem *Bretton Woods Agreement*. Sehingga terbentuklah beberapa institusi atau organisasi yang muncul dari perjanjian tersebut yang selalu mempromosikan pentingnya GDP sebagai indikator keberhasilan pembangunan global. Diskursus ini kemudian terus bertransformasi dari waktu ke waktu dan dari negara Utara ke negara Selatan, seiring dengan perkembangan institusi pembangunan internasional dan tokoh-tokoh atau ahli ekonomi dan pembangunan yang ikut mendukung diskursus ini. Akibatnya, diskursus ini diterima secara luas, menjadi dominan, dan membentuk sebuah hegemoni terhadap diskursus lain yang menciptakan sebuah mitos bahwa suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila menerapkan pembangunan ekonomi, dengan GDP sebagai indikator utama keberhasilannya.

Akibatnya muncul *game of truth* dalam bentuk regulasi atau aturan main yang dikeluarkan oleh institusi atau organisasi yang berasal dari *Bretton Woods Agreement* tersebut. Pasar bebas, investasi atau *Foreign Direct Investment (FDI)*, dan lain sebagainya, muncul sebagai bagian dari aturan main agar suatu pembangunan dapat mencapai titik keberhasilan. Sehingga muncullah berbagai permasalahan sosial-ekonomi yang timbul sebagai konsekuensi dari keberadaan *game of truth* tersebut. Dengan sanksi yang dikeluarkan menurut pihak yang mempromosikan GDP ini, baik negara maupun institusi internasional.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Foucault, melihat dari kenyataan bahwa *regime of truth* diciptakan sebagai sebuah kebenaran yang bersifat politik dan memiliki banyak konsekuensi, diskursus dominan tersebut perlu untuk dilawan atau ditandingi (*counter*). Maka dari itu, GNH yang ditawarkan oleh Bhutan sebagai alternatif paradigma pembangunan global dapat diposisikan sebagai bentuk *counter-discourse* dari diskursus pembangunan ekonomi yang mengguankan indikator GDP, seperti yang dikonstruksi oleh negara-negara Barat.

1.4 Argumentasi Utama

Menggunakan kritik Michael Foucault terhadap hegemoni kebenaran sebuah diskursus (*regime of truth*), penelitian ini berargumen bahwa dengan menawarkan *Gross National Happiness* (GNH) Bhutan telah melakukan *counter-discourse* terhadap *Gross Domestic Product* (GDP), karena paradigma pembangunan yang dikonstruksi oleh negara-negara Barat tersebut gagal mengukur dan membawa kesejahteraan serta kebahagiaan.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksplanasi deduktif. Metode eksplanasi ini digunakan karena dapat menjelaskan peristiwa tunggal dan umum dengan argumen deduktif yang sah (Mas'ood, 1994). Untuk menjelaskan fenomena yang diteliti, penelitian ini menggunakan teori yang dapat menjelaskan mengapa sebuah fenomena bisa terjadi (Mas'ood, 1994). Untuk menghubungkan antara teori dengan analisis yang akan dijelaskan dalam penelitian ini, mode analisis yang digunakan adalah *qualitative data analysis* (Babbie, 2014).

Dalam mengumpulkan data dan fakta tersebut, penelitian ini akan menggunakan analisis data sekunder melalui berbagai sumber yang *valid* dan terpercaya, seperti buku, jurnal, *report*, berita, dan berbagai sumber dari media internet atau elektronik. Pendekatan analisis yang digunakan dalam menggunakan fakta dan data yang ada adalah *case-oriented analysis*, dimana merupakan pendekatan analisis untuk memahami dan mendalami kasus tertentu menggunakan detail fakta-fakta yang ada (Babbie, 2014).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dijabarkan ke dalam lima bab. Pada **Bab I** terdapat bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritis, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematis penulisan. Selanjutnya pada **Bab II** berisi penjelasan mengenai periodisasi diskursus pembangunan global yang pernah ada di dunia. Selain itu, bab ini juga terdapat penjelasan mengenai model pembangunan ekonomi dan periodisasinya. Bahasan dalam bab ini dilanjutkan dengan penjelasan mengenai penggunaan GDP sebagai indikator keberhasilan pembangunan global.

Pada **Bab III** berisi penjelasan mengenai kemunculan *Gross National Happiness (GNH)*. Bab ini berisikan penjelasan mengenai sejarah kemunculannya serta substansi dari GNH tersebut untuk kemudian dijelaskan korelasinya dengan ajaran Buddha Mahayana. Dimana agama Buddha memiliki pengaruh yang besar terhadap tercetusnya GNH di Bhutan.

Selanjutnya, pada **Bab IV** berisi analisis alasan Bhutan berupaya menawarkan GNH sebagai alternatif paradigma pembangunan global. Kasus tersebut akan dianalisis menggunakan *counter-discourse* sebagai bentuk

kritik terhadap *regime of truth* yang dikemukakan oleh Michael Foucault. Secara lebih rinci, bab ini juga akan menjelaskan dalam bentuk apa saja usaha Bhutan memperkenalkan GNH sebagai alternatif indeks pembangunan. Selain itu, bab ini juga mengandung penjelasan mengenai bagaimana dan sejauh mana dunia menempatkan kebahagiaan dalam agenda pembangunan. Pada bab terakhir, yaitu **Bab V** berisi kesimpulan sebagai bentuk penguatan hasil dari penelitian.